

Tugas dan Peran Civil Society dalam Mewujudkan Aceh Bersih dari Korupsi: Perspektif Sosiologi

Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad

- Bagaimana seseorang memiliki kekuasaan dan tidak punya daya untuk keluar dari situasi untuk melakukan korupsi?
- Apa dampak bagi seseorang jika tidak melakukan korupsi dari sisi kajian Sosiologi?

Makna Korupsi

- Dishonest or illegal behavior by officials in positions of power, especially when they accept money in exchange for doing things for someone.

- 'the abandonment of expected standards of behavior by those in authority for sake of unsanctioned personal advantage...One problem with such a definition is that in many societies corrupt practices, as specified by legal or administrative rules, may often be customary and widely accepted as normal behavior'

Kekuasaan

- Kekuasaan untuk menjaga hubungan sosial di dalam membuat suatu keputusan. Disini 'pengaruh' dan 'uang' sangat memainkan peran yang cukup signifikan di dalam suatu kekuasaan.
- Hubungan antara aspek koersif dan konsensus. Maksudnya adalah, kekuasaan datang dari seseorang kepada orang lain yang berdasarkan pada perintah yang ada sanksi, kesepakatan, dan keinginan untuk kerja sama.
- Kekuasaan merupakan "teori permainan" (*theory of game*). (Parsons 1966, 240)

- ... the term *elite* in the broader sense: all those who in diverse activities are high in the hierarchy, who occupy any important privileged positions, whether in terms of wealth or of prestige. The term *political class* should be reserved for the much more narrow minority who actually exercise the political functions or government. The *ruling class* would be situated between *elite* and the *political class*: it includes the privileged people who, without exercising actual political functions, influence those who govern and those who obey, either because of the moral authority which they hold, or because of the economic or financial power they possess. (Aron 1966, 204)

- Agama tidak difungsikan lagi sebagai "pengendali" dari teori permainan untuk mencapai kekuasaan. Karena setiap individu berada di dalam posisi untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang akan dibagikan kepada kelompoknya sendiri. Karena situasi ini adalah masyarakat yang sedang menuju proses sekularisasi, maka pengaruh agama tidak akan dilibatkan. Situasi ini memunculkan pertarungan kelas, seperti yang terlihat di Aceh, yang pada ujungnya berupaya untuk mendapatkan kekuasaan, yang akhir bagaimana mengelola kekuatan tersebut untuk menguasai sebanyak mungkin uang.

Falsafah yang dibangun

- *The more the religious have been true religions of salvation, the greater has this tension been.*" (Weber 1974, 328)
- *"your want of today may be mine of tomorrow."* (Weber 1974, 329)

- Situasi Aceh hari ini masih persis seperti era di Jerman pada era kelahiran teori-teori ilmu sosial. Perpindahannya status seseorang dari tradisional yang memiliki fungsi di dalam kawasan urban, sama sekali, pada hakikatnya tidak mementingkan agama, di dalam wilayah publik.
- Struktur masyarakat Aceh belum mapan, terlebih lagi ketika berada di bawah payung sistem kekuasaan dari Jawa.
- Akibatnya, perilaku korup menjadi suatu keniscayaan, yang tidak akan dapat dihilangkan.
- Karena sistem berpikir masyarakat yang baru keluar dari proses kolonial, memang seperti itu.
- Pertama sekali, akan terjadi konflik pada level ideologi, setelah itu akan berpindah pada persoalan bagaimana peran sebaiknya masyarakat dan elit di dalam bersinergi untuk membangun bersama.

Civil Society

- Suatu kelompok/kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain.
- "Wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya."

- *Civil society* merupakan kekuatan kesadaran masyarakat untuk mandiri dan tidak lagi bergantung pada negara.
- Jika *civil society* hendak dibangkitkan di Aceh, maka kekuatan ini harus bisa sejajar atau di atas kekuatan *Nanggroe*. Namun, karena ketergantungan masyarakat pada negara di Aceh sangatlah kuat.
- Sebagai contoh, orang berlomba-lomba menjadi aparatur negara (baca: PNS/TNI/POLRI).
- Masyarakat juga masih berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan proyek dari negara (baca: kontraktor)
- Secara tersirat dapat dinyatakan bahwa perilaku korup akan terjadi, ketika *civil society* belum mandiri.

Pengalaman Civil Society di Aceh

- Masyarakat Aceh membangun sistem tersendiri yang dikenal dengan istilah *timang* (sejajar). Ketika masyarakat sudah sejajar, maka struktur sosial berjalan dengan sendirinya.
- Aktor-aktor utama di dalam masyarakat berfungsi sebagaimana mestinya. Penguasa menjaga sistem berpikir masyarakat melalui agama dan adat. Sedangkan, ulama menjaga sistem berpikir masyarakat dengan budaya dan ilmu. Kekuatan dan kematangan masyarakat saat itu sangat teruji, hingga kedatangan penjajah. Disini, proses yang dilakukan oleh penjajah adalah mulai mengadu domba antar aktor utama dan menghancurkan pusat kekuasaan, yaitu istana.
- Saat itu, penguasa untuk tetap mendapatkan perhatian dari rakyat, memberikan mandat kekuasaan pada otoritas ulama. Sehingga, ketika melawan penjajah, rakyat lebih bergantung pada ulama, dibandingkan dengan bangsawan.

- Adapun fase berikutnya adalah gugatan dari masyarakat terhadap bangsawan yang menghasilkan revolusi sosial di Aceh. Disini masyarakat tidak lagi mempercayai bangsawan (borjuis). Lalu ulama pun menjadi "pemangku kekuasaan dan otoritas sekaligus." Apapun persoalan yang terjadi di masyarakat, diselesaikan oleh ulama yang berfungsi sebagai "Bapak Masyarakat." Di dalam fase ini, ulama akhirnya meminta kembali kedaulatan rakyat Aceh pada sumber kekuasaan di Pulau Jawa. Lagi-lagi, ulama bangkit melawan pemerintah untuk mengembalikan kedaulatan rakyat Aceh. Sayang, setelah dikembalikan "kedaulatan" (baca: keistimewaan), rakyat Aceh tidak lagi memiliki pusat kekuasaan, yaitu kerajaan.

-
- Pemerintah Indonesia mulai menginstal struktur dan paradigma sistem sosial dari masyarakat Jawa, tidak terkecuali masalah kekuasaan.

- Struktur kekuasaan Jawa memang tidak mengedepankan sistem demokrasi. Pemimpin dipilih karena kekuatan supranatural dan dia "bersembunyi" dibalik istananya. Karena itu, tidak mengejutkan kalau Sultan Yogyakarta tidak menginginkan adanya pemilihan kepala daerah. Karena, kalau dilaksanakan pemilihan tersebut, akan menguncang kewibawaan dia sebagai Raja Jawa. Demikian pula, orang-orang yang berkhidmat di sampingnya, akan melaksanakan semua ritual yang akan membantu kharisma dan kekuasaan raja.

- , "tidak maju ke depan mengikuti jalan lurus, sambil meninggalkan masa lampau, tetapi tumbuh dari dalam dengan menyusuri masa lalu ke pinggiran, seperti halnya kulit bawang."
- Dalam kultur inilah kehidupan kekuasaan baru berkembang di Aceh, dimana simbol-simbol kekuasaan dari Jawa sudah dipraktikkan, termasuk adanya *Pegawai Negeri Sipil*. (Lombard 2008)

- Di dalam tradisi Jawa, orang yang mengabdikan pada raja dikenal dengan sebutan *abdi dalam*. Mereka berfungsi sebagai penyelaras tatanan kosmik kekuasaan Raja dengan pihak luar. Sehingga muncul istilah *abdi dalem* dan *wong jobo* (orang luar) yang boleh jadi dikenal dengan istilah *wong cilik*. Adapun pelaksananya dikenal dengan *Pegawai*.
- Lombard menuturkan bahwa kata *pegawai* terbentuk dari kata dasar Jawa *gawai* yang berarti "mengelola" dan "bekerja." Maka makna dari kata *pegawai* yang sesungguhnya dapat diperkirakan sebagai yang "menjalankan", "menggerakkan" tatanan sosial

- Jadi *pegawai* itu mulanya adalah miniatur sang penguasa. Ia adalah pancaran sang raja, dan seperti halnya raja, dia pun harus menjamin keselarasan di bagian dunia (mikrokosmos) yang telah dipercayakan kepadanya. Ia merupakan "anak buah" atau "orang kepercayaan" dari atasannya, yang menguasai suatu ruang (mikrokosmos) yang lebih besar, dan yang telah mengangkatnya secara pribadi. Namun, dalam batasan ruang gerak yang dipercayakan kepadanya, dia sendiri mempunyai suatu kekuasaan yang hampir mutlak ... Dia tidak mendapat gaji tetap sedikit pun, seperti halnya raja yang tidak mempunyai anggaran rumah tangga ... Idealnya, *pegawai* itu hidup dari daerah kekuasaannya, seperti halnya raja yang hidup dari kerajaannya.

- (Lombard 2008, 72)

- karena tidak ada gaji adalah "*sepi ing pamrih rame ing gawe* (menekan kepentingannya sendiri dan mencurahkan seluruh jiwa dan raga untuk melaksanakan kewajibannya). Karena itu, seorang *Pegawai* akan berperilaku *setya* (kesetiaan), *sadu* (kerendahan hati), dan kesungguhan (*tuhu*). (Lombard 2008, 73)

- Di dalam struktur kekuasaan seperti di atas, Aceh menjadi propinsi dan memiliki bupati. Paradigma keraton Jawa telah menjelma di dalam sistem berpikir mereka. Jika ditelaah secara mendalam, mereka yang berasal dari kelompok bangsawan diberikan akses pada kekuatan finansial. Sehingga, tidak mengejutkan kelompok bangsawan Aceh, yang pernah menjadi "musuh bersama" rakyat Aceh, dikuatkan kekuatan ekonomi mereka di Pulau Jawa.

- Proses pengrusakkan struktur peran ulama dilakukan pada era Orde Baru. Saat itu, ulama mulai dianggap sebagai "penentu" bagi kemenangan partai politik pemerintah Indonesia. Ulama dan pesantren mulai didekati oleh para penguasa. Intinya adalah bagaimana mampu memenangkan pemilu. Berbagai program pemerintah pun kemudian dilakukan melalui otoritas ulama. Setelah itu, muncullah ketergantungan sebagian para ulama kepada pemerintah. Disinilah kemudian otoritas ulama mulai bergeser, sebagaimana yang dilihat pada hari ini. Mereka tetap diperlukan di dalam kehidupan masyarakat, namun peran dalam bidang sosial dan politik telah dimainkan sejak era Orde Baru.

(Amiruddin 2003)

- *Civil society* di Aceh belum begitu mandiri. Elemen-elemen penting di dalam masyarakat, yang dahulu kala, bisa berdiri sendiri, tanpa campur tangan penguasa, ternyata setelah era Orde Baru, tidak mampu lagi berkitit. Mereka semua perlu pada penguasa. Karena itu, di setiap lini kehidupan rasa ketergantungan ini masih nyata. Misalnya, perilaku masyarakat yang ingin *diangkat* menjadi pegawai negeri. Hal tersebut terlihat pada minat masyarakat untuk melakukan *honor* pada lembaga-lembaga pemerintahan. Demikian pula, rasa ketergantungan ulama pada pemerintah pun mulai tampak dan agak susah dilepaskan. Karena sistem sosial masyarakat Aceh sudah tidak lagi mandiri, maka dapat dipastikan perilaku korup akan muncul, ketika mereka ingin dekat dan menikmati kekuasaan.

- *What they all share is extractive institutions. In all these cases the basis of these institutions is an elite who design economic institutions in order to enrich themselves and perpetuate their power at the expense of the vast majority of people in society."* Inilah semangat pengembangan kehidupan bernegara di dunia berkembang. Sehingga, formula apapun tetap tidak akan mampu menahan arus lajunya perilaku korup.
- (Acemoglu and Robinson 2012, 399)

Cara untuk mengubah

- *Pertama*, merubah sistem berpikir
- *Kedua*, penanaman moralitas.
- *Ketiga* penguatan sistem *check and balances*.

-
- Terima kasih